



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
LAMPUNG DAN BENGKULU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU

JALAN MUSEUM NO. 2, JEMBATAN KECIL, SINGARAN PATI, KOTA BENGKULU, 38224;
TELEPON: (0736) 23085; FAKSIMILE: (0736) 23112; SUREL: KPKNLBENGKULU@KEMENKEU.GO.ID

NOTA DINAS
NOMOR ND-35/WKN.05/KNL.01/2022

Yth : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2021
Tanggal : 20 Januari 2022

Sehubungan dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara nomor ND-53/KN.1/2022 tanggal 04 Januari 2022 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021, terlampir kami sampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021 KPKNL Bengkulu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Teddy Suhartadi Permadi

Tembusan:
Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KPKNL BENGKULU

LAPORAN KINERJA 2021

AKUNTABILITAS CAPAIAN KINERJA

Peningkatan kinerja dalam berkontribusi nyata mewujudkan good governance dan menjadi kantor pelayanan yang terpercaya dalam pengelolaan kekayaan negara yang profesional dan akuntabel.

DJKN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. *Good governance* dapat terwujud melalui keseimbangan tiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Dalam rangka transparansi atas implementasi visi dan misi yang telah dicanangkan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai pelaksana tugas Menteri Keuangan di bidang pengelolaan kekayaan negara menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban tertulis berupa Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN KPKNL Bengkulu tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN mempunyai fungsi ganda sebagai alat kendali, sekaligus alat pemacu peningkatan kinerja dari setiap seksi yang ada di lingkungan KPKNL Bengkulu. Dilihat dari fungsi kendali, kebijakan yang diinisiasi KPKNL Bengkulu nantinya berkontribusi nyata mewujudkan *good governance*. Terkait fungsi pemacu peningkatan kinerja, LAKIN diharapkan menjadi alat bantu (*tool*) internal KPKNL Bengkulu untuk *self assesment* atas kinerja organisasi selama ini.

Kami berharap visi KPKNL Bengkulu menjadi kantor pelayanan yang terpercaya dalam pengelolaan kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat mampu dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai KPKNL Bengkulu. Visi tersebut memiliki makna adanya tantangan untuk mewujudkan profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas dalam pengelolaan kekayaan negara.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN, KPKNL Bengkulu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

TUGAS:

“Melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang”

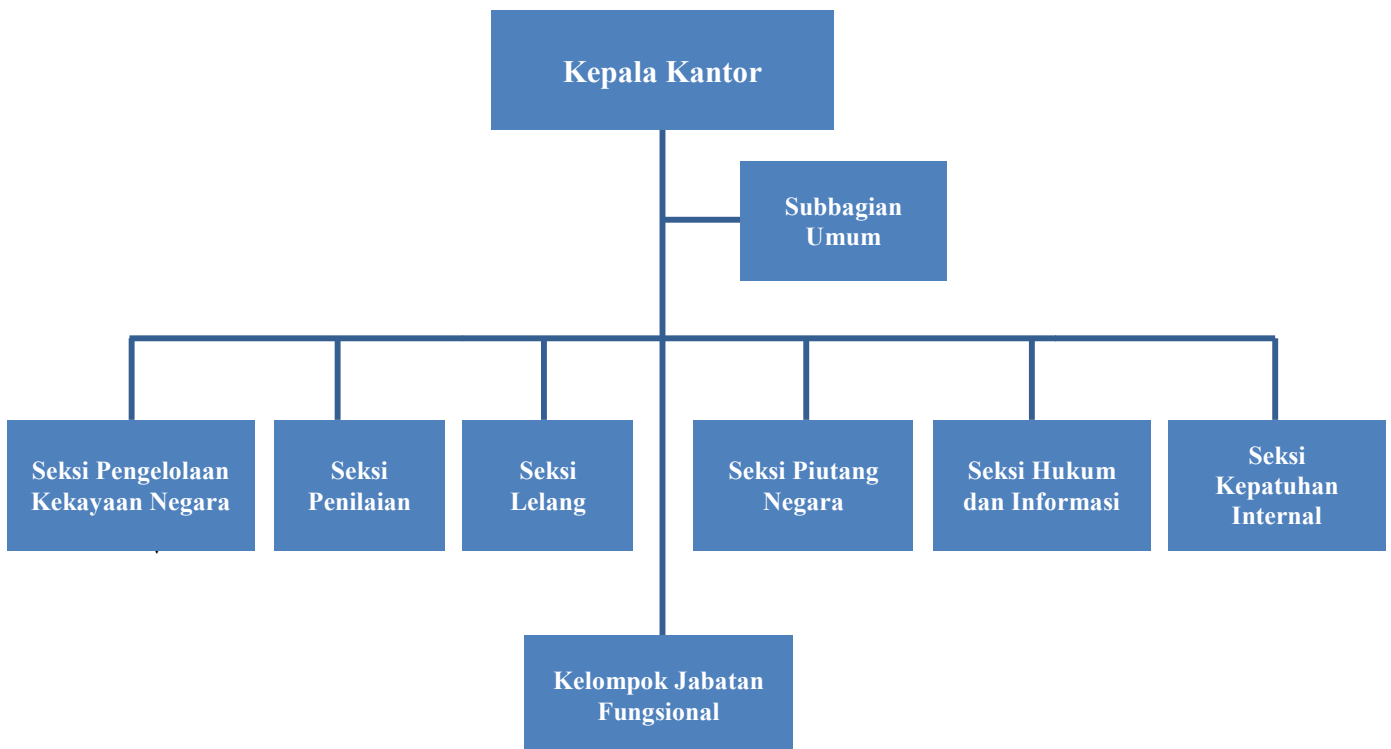
FUNGSI :

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
- d. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;

- i. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
- j. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
- k. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- l. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
- m. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- n. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Struktur organisasi KPKNL Bengkulu dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Bagan 1
Struktur Organisasi KPKNL Bengkulu



1.3. Aspek Strategis Organisasi

Secara struktural, KPKNL Bengkulu sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan berada di bawah Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu yang mempunyai visi mengelola kekayaan negara secara profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di lingkungan KPKNL Bengkulu. Tahun 2021, KPKNL Bengkulu memiliki 10 (sepuluh) sasaran strategis dan dua puluh (20) Indikator Kinerja Utama dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1
Sasaran Strategis dan IKU KPKNL Bengkulu Tahun 2021

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)	
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK
		1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)
		1c-CP	Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memeuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang
		2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi
		4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)
		4c-CP	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN
		5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang
		5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction
		5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN
6	Edukasi yang Efektif	6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

8.	SDM yang Kompeten	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai
9.	Organisasi yang Fit For Purpose	9a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK
		9b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja
		9c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang, KPKNL Bengkulu memiliki peran strategis sebagai berikut:

a. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Bengkulu memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, penyusunan dan penyempurnaan peraturan, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara. Sebagai asset manager, KPKNL Bengkulu mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan, serta peningkatan alternatif pembiayaan negara melalui instrumen utilisasi barang milik negara (BMN) dengan tujuan utama yaitu pemanfaatan, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara.

Dalam setiap tahapan pengelolaan kekayaan negara mulai dari pengadaan sampai dengan penghapusan, penilaian mempunyai peranan dalam menyediakan informasi nilai wajar aset dan analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*the Highest and Best Use atau HBU*). Selain BMN, Penilai KPKNL Bengkulu juga melakukan penilaian

atas aset yang akan ditetapkan statusnya sebagai BMN seperti dalam proses pengadaan aset, dan dalam rangka tukar-menukar BMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan DJKN, Penilai DJKN berwenang untuk melakukan penilaian Kekayaan Negara Dipisahkan, Barang Milik Daerah, dan Kekayaan Negara Lain-lain.

b. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Bengkulu di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan mentransformasikan *Non Performing Loan* menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab apapun. Selain itu, tugas KPKNL Bengkulu dalam pengurusan piutang negara adalah penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

c. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Bengkulu secara terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun noneksekusi sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*). Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang

berfungsi sebagai akta van transport untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Bengkulu diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

d. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara

Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang negara, KPKNL memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) Pengurusan Piutang Negara. Pada pengelolaan kekayaan negara, KPKNL memperoleh PNBP melalui pemanfaatan BMN, salah satu mekanisme pemanfaatan yang sering digunakan adalah sewa sebagian atau seluruh BMN pada satuan kerja yang di kelola KPKNL Bengkulu, yang mana biaya sewa tersebut disetorkan ke kas negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil bea lelang termasuk biad balai lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

VISI

Dalam mengemban tugas dan fungsi, KPKNL Bengkulu mempunyai visi sebagai berikut:

“Menjadi kantor pelayanan yang terpercaya dalam pengelolaan kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

MISI

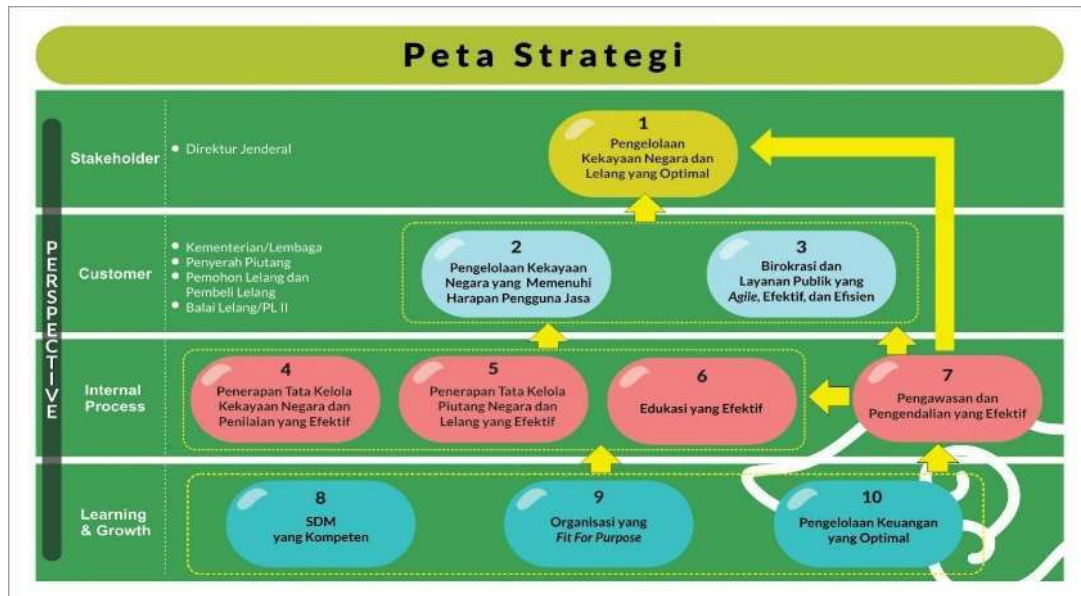
Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, KPKNL Bengkulu mempunyai misi antara lain:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
- b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
- d. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
- e. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

2.2 Perencanaan Kinerja

Berdasarkan Lampiran I Kontrak Kinerja Kepala KPKNL Bengkulu Nomor : 7/KN.17/2021 tanggal 29 Januari 2021, digambarkan peta strategi dan ditetapkan rincian target capaian kinerja KPKNL Bengkulu selama tahun 2021.

Gambar 1
Peta Strategi KPKNL Bengkulu tahun 2021



Tabel 2
Target IKU KPKNL Bengkulu Tahun 2021

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%
		1c-CP Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	87
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,38
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%
		4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%

5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%
		5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		5d-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	12,5%
6.	Edukasi yang Efektif	6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
8.	SDM yang Kompeten	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9.	Organisasi yang Fit For Purpose	9a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	75
		9b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
		9c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja organisasi Kemenkeu-*Three* untuk KPKNL Bengkulu tahun 2021 yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu, maka capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Bengkulu adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Capaian IKU KPKNL Bengkulu Tahun 2021

Kode	IKU	V/C	Target s.d.Q4	Realisasi s.d.Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)							29,80%	
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							119,21%	
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	73,19%	19%	40%	118,040%	118,04%	hijau
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	140,55%	14%	30%	140,55%	120,00%	hijau
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	128%	14%	30%	127,94%	120,00%	hijau
	Customer Perspective(15%)							16,01%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							106,58%	
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	P/H	87,00	99,48	11%	44%	114,34%	114,34%	hijau
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	100,47%	14%	56%	100,47%	100,47%	hijau
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							106,85%	
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4,38	4,68	21%	100%	106,85%	106,85%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							32,00%	
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							106,74%	
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	100,00%	19%	43%	100,00%	100,00%	hijau
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	101,49%	11%	25%	101,49%	101,49%	hijau
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	0,79%	14%	32%	196,41%	120,00%	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							112,17%	
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	P/M	100%	100,00%	14%	25%	100,00%	100,00%	hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35,00%	39,79%	14%	25%	113,70%	113,70%	hijau
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventi	P/M	92,00%	100,00%	14%	25%	108,70%	108,70%	hijau

5d-CP	Deviasi Data PNBPF Fungsional DJKN	P/M	12,50%	0,00%	14%	25%	200,00%	120,00%	hijau
6	Edukasi yang efektif							101,42%	
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	89	90,26	14%	100%	101,42%	101,42%	hijau
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							106,31%	
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	90,36%	14%	100%	106,31%	106,31%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)							33,63%	
8	SDM yang kompeten							120,00%	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
9	Organisasi yang fit for purpose							116,16%	
9a-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	P/M	75	95,63	14%	33%	127,51%	120,00%	hijau
9b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	75	81,36	14%	33%	108,48%	108,48%	hijau
9c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	98,90	14%	33%	123,63%	120,00%	hijau
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							100,10%	
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	95,60%	14%	100%	100,10%	100,10%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								111,31%	hijau

3.1.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja mengacu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPKNL Bengkulu. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL Bengkulu yang menjadi kontrak kinerja dapat tercapai.

Secara umum ikhtisar capaian KPKNL Bengkulu Tahun 2021 adalah dari 20 (dua puluh) IKU berhasil tercapai status hijau atau memenuhi target. Secara umum, capaian kinerja KPKNL Bengkulu pada tahun 2021 dengan Nilai Kinerja Organisasi adalah sebesar **111,31%**.

Berikut ini penjabaran capaian masing-masing IKU KPKNL Bengkulu berdasarkan sasaran strategis.

1. Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 huruf g berbunyi “*kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah*”.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi perencanaan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pengawasan/pengendalian. Kekayaan negara meliputi persediaan, aset tetap, aset tak berwujud dan aset lainnya sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengelolaan kekayaan negara terdiri dari pengelolaan barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, dan pengelolaan kekayaan negara lain-lain. Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila dapat diwujudkan pengelolaan APBN yang efektif dan efisien. Salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dapat dilakukan melalui penertiban BMN secara hukum, fisik, dan administrasi, dimana hal ini secara teknis dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang, penurunan outstanding piutang negara, dan dilakukannya pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

Penggunaan dan pemanfaatan BMN harus digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi. Selain menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetorkan ke kas negara, pemanfaatan BMN juga dapat mencegah penguasaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah.

Tabel 4

Target dan Realisasi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
Uraian IKU	Target Awal	Target Addendum	Realisasi				
			Q1	Q2	Q3	Q4	2021
1a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	62%	-	-	84,57%	76,33%	68,52%	68,52%
1b-CP Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang (PNBP)	100%	100%	26,63%	43,51%	74,39%	140,55%	140,55%
1c-CP Tingkat penurunan nilai outstanding piutang negara	Max	-	-	99,44%	121,28%	131,29%	131,29%

Dari tabel tersebut, KPKNL Bengkulu dalam pencapaian target Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal mampu memenuhi target pada keseluruhan IKU yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Mengenai hal tersebut, IKU persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang memberikan nilai manfaat ekonomi dengan mendorong peningkatan penerimaan negara melalui pengelolaan kekayaan negara.

Nilai manfaat ekonomi berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada lingkup KPKNL Bengkulu diperoleh dari pengelolaan BMN, PNBP Piutang Negara, dan PNBP Lelang. Masing-masing upaya pengelolaan kekayaan negara tersebut memiliki nilai target yang berbeda.

Pada tahun 2021 KPKNL Bengkulu diamanatkan target PNBP sebesar Rp2.765.000.000,00 dari pengelolaan BMN, Rp5.866.470,00 dari pengurusan piutang negara, dan Rp1.477.000.000,00 dari pelaksanaan kegiatan lelang, dengan total keseluruhan capaian PNBP yang telah diperoleh KPKNL Bengkulu pada tahun 2021 adalah sebesar Rp5.970.908.789,00 atau setara dengan 140,55% dari target yang telah ditetapkan dengan rincian Rp4.727.808.956,00 dari pengelolaan BMN, Rp21.804.704,00 dari pengurusan piutang negara, dan Rp1.220.695.129,00 dari

pelaksanaan kegiatan lelang. Namun pada awal Februari Tahun 2020 pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) mulai masuk ke Indonesia dan mengakibatkan dampak yang besar dalam aspek kehidupan di Indonesia. Untuk mencegah penularan semakin luas, kegiatan yang berpotensi mempertemukan banyak orang dalam satu waktu yang sama harus dibatasi. Hal tersebut tentunya mempengaruhi dalam perkembangan perekonomian di Indonesia.

Apabila dibandingkan dengan target dan capaian pengelolaan kekayaan negara yang optimal pada tahun sebelumnya, KPKNL Bengkulu memiliki prestasi yang amat baik karena adanya peningkatan persentase realisasi capaian PNBPN, dimana capaian PNBPN pada tahun 2020 adalah sebesar 83,32% dari target senilai Rp5.573.200.880,00.

Capaian kinerja di KPKNL dapat diperoleh dengan segala keterbatasan yang ada karena pengaruh dampak pandemic *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang melanda seluruh dunia sejak tahun 2020. Dampak pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja KPKNL Bengkulu, setiap kegiatan yang berpotensi mempertemukan banyak orang dalam satu waktu yang dilaksanakan secara daring. Selanjutnya, penyelesaian tugas yang memerlukan kegiatan survei lapangan dilakukan dengan menerapkan protocol kesehatan secara ketat. Hal tersebut dimaksud untuk mendukung upaya pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19. Dengan adanya upaya peningkatan PNBPN dari pengelolaan BMN, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL Bengkulu sepanjang tahun 2021 diharapkan dapat mendukung pemerintah pusat dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dan mendukung pertumbuhan perekonomian secara nasional.

2. Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Lelang sebagai salah satu cara penjualan memiliki fungsi privat dan fungsi publik. Dikatakan memiliki fungsi privat karena lelang merupakan institusi pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli, maka lelang berfungsi memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang, sedangkan fungsi publik lelang yang dimaksud adalah bahwa:

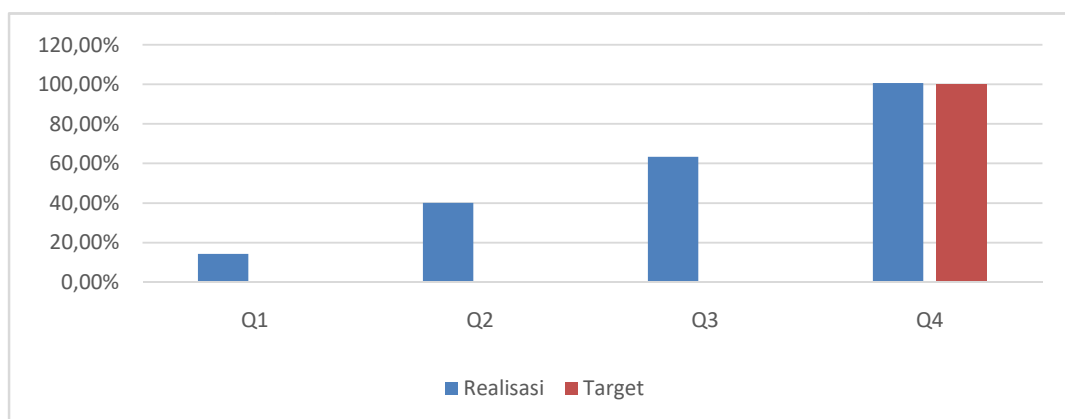
- a. Pengamanan asset yang dimiliki/dikuasai oleh negara untuk meningkatkan efisiensi dan tata tertib administrasi pengelolaannya.
- b. Mendukung badan-badan peradilan dalam mewujudkan fungsi peradilan dengan pelayanan penjualan barang yang mencerminkan keadilan, keamanan dan kepastian hukum, karena itu semua penjualan eksekusi Pengadilan, PUPN, Kejaksaan dan sebagainya dilakukan secara lelang.
- c. Mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk bea lelang dan uang miskin.

Pelaksanaan lelang terbuka di muka umum dan itu dilakukan oleh pejabat lelang, pejabat lelang kelas I, yaitu pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan seluruh jenis lelang.

Pada tahun 2021, KPKNL Bengkulu memiliki target persentase hasil lelang sebesar 100% atau senilai Rp41.000.000.000. Hasil realisasi yang dicapai oleh KPKNL Bengkulu tahun 2021 pada presentase hasil lelang hanya didapatkan 100.58% atau senilai dengan Rp41.239.510.672, hal tersebut tentunya membuat target tahun 2021 tercapai.

Realisasi Faktor yang mendukung tercapainya IKU capaian Pokok Lelang adalah capaian lelang pegadaian sebesar Rp22.299.044.500,- atau 139.37% melampaui target 100% atau senilai Rp16.000.000.000,- sedangkan capaian pokok lelang dari Pejabat Lelang Kelas I hanya mencapai Rp18.940.466.172,- atau 75.76% dari target sebesar Rp25.000.000.000,-.

Grafik 1
Target dan Capaian Pengelolaan Kekayaan Negara



Dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, KPKNL Bengkulu memiliki 12 (dua belas) jenis layanan unggulan. Berdasar KMK-187/KMK.01/2010 sebagaimana telah diubah dengan KMK-35/KMK.01/2014 dalam layanan unggulan ditetapkan satuan waktu per satu kali pelayanan. Tujuan dari layanan unggulan ini agar manfaat dari kegiatan pelayanan yang diberikan oleh jajaran Kemenkeu c.q. DJKN c.q. KPKNL Bengkulu dapat segera dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Dalam manajemen pelayanan yang berkualitas pada tahun 2021 KPKNL Bengkulu mendapatkan skala 99,48 dari 100.

Tabel 5
Layanan Unggulan KPKNL Bengkulu

No.	Layanan Unggulan
Pengelolaan Kekayaan Negara	
1	Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL
2	Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL
Pelayanan Penilaian	
3	Penilaian dalam rangka Pemanfaatan BMN pada KPKNL
4	Penilaian dalam rangka Pemindahtanganan BMN pada KPKNL
Pelayanan Lelang	
5	Penetapan Jadwal Lelang
6	Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang dan Dokumen Kepemilikan Barang
Hukum dan Informasi	
7	Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang
8	Pelayanan Pemberian Kuitansi Pembayaran Harga Lelang
9	Penyetoran Hasil Bersih Lelang (Kas Negara)
10	Penyetoran Hasil Bersih Lelang (selain Kas Negara)
11	Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas
12	Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai

3. Sasaran Strategis : Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (*exceeding customer needs*).

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*). Survei dilakukan dengan memberikan kuisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan.

Lingkungan KPKNL Bengkulu, survei dilakukan secara internal atas layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang dengan cara menyebarkan kuesioner tentang pelayanan pada bidang masing-masing kepada *stakeholders* atau satuan kerja (satker) yang diakumulasikan per tahun. Dalam pelayanan publik yang prima yaitu indeks kepuasan pengguna layanan pada KPKNL Bengkulu Tahun 2021 didapatkan skala 4,68 dari target 4.35, capaian ini tentunya meningkat dari capaian di tahun sebelumnya.

4. Sasaran Strategis: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dalam kaitannya dengan kekayaan

negara, kegiatan tata kelola meliputi seluruh siklus pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, penilaian, piutang negara, dan lelang. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Adapun upaya dalam mengelola kekayaan negara yang efektif adalah pelaksanaan sertifikasi tanah BMN yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penswertipkatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, implementasi evaluasi kinerja BMN dan deviasi ketergunaan hasil penilaian.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Penilaian yang berkualitas adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang penilaian dan yang berlaku umum; diselesaikan sesuai dengan SOP yang berlaku; dan dapat menghasilkan nilai sesuai dengan tujuan penilaian tersebut; serta dapat digunakan oleh pemohon/pengguna jasa dalam mengambil keputusan pengelolaan terkait aset yang dinilai. Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Penilaian yang berkualitas adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang penilaian dan yang berlaku umum; diselesaikan sesuai dengan SOP yang berlaku; dan dapat menghasilkan nilai sesuai dengan tujuan penilaian tersebut; serta dapat digunakan oleh pemohon/pengguna jasa dalam mengambil keputusan pengelolaan terkait aset yang dinilai. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Pada IKU ini dijelaskan bahwa upaya tersebut untuk mengurangi selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Jadi semakin kecil deviasi yang ada semakin baik dalam peningkatan upaya pelayanan penilaian yang diberikan.

Tabel 6
Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
Uraian IKU	Target Awal	Target Addendum	Realisasi				
			Q1	Q2	Q3	Q4	2021
4a-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasi	181	-	-	71	119	181	181
4b-CP Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portfolio asset)	134	-	23	54	102	134	134
4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%	-	3,10%	1,00%	0,85%	0,79%	0,79%

5. Sasaran Strategis : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dalam kaitannya lelang, kegiatan tata kelola meliputi beberapa kegiatan seperti perencanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian. Selain itu, upaya penyelesaian BKPN masuk ke dalam tata kelola tersebut.

Adapun skema yang dilakukan meliputi persentase produktivitas lelang dan persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction*. Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku. Selain itu, E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka). Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang. Implementasi e-auction meliputi: 1) Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa

kehadiran peserta lelang. 2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account).

Tabel 7
Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
Uraian IKU	Target Awal	Target Addendum	Realisasi				
			Q1	Q2	Q3	Q4	2021
5a-CP Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	24%	-	0	18%	23%	24%	24%
5b-CP Persentase produktivitas lelang	34%	-	47,56%	41,71%	41,50%	41,08%	41,08%
5c-CP Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	90%	-	100%	100%	100%	100%	100%
5d-CP Deviasi data PNBP fungsional DJKN	12,50%	-	0	0	0	0	0

6. Sasaran Strategis: Edukasi yang Efektif

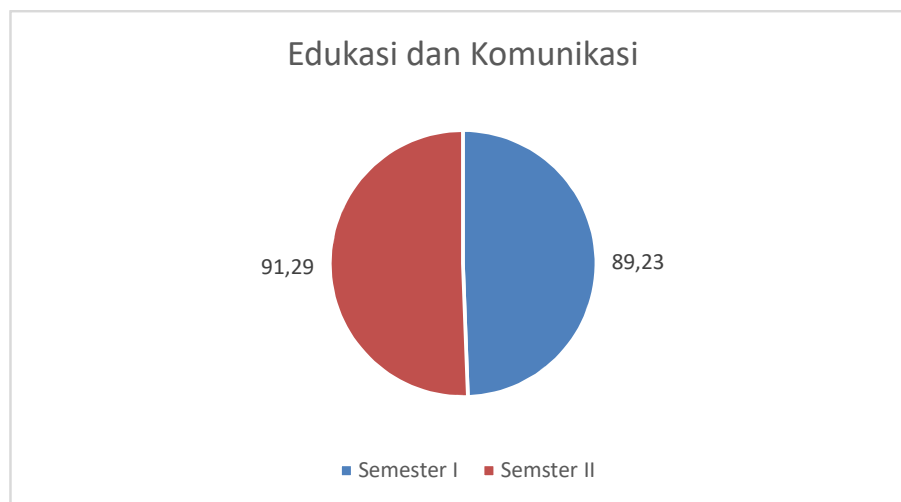
Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai. Ruang lingkup edukasi adalah sebagai berikut:

- a. edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi,
- b. edukasi eksternal dari KPKNL Bengkulu kepada pengguna layanan/masyarakat umum.

Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau workshop. Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan feedback yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan. Pelaksanaan penilaian pada tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi ini

dengan cara menyebarkan kuesioner. Pada tahun 2021, KPKNL Bengkulu mendapatkan tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi sangat memuaskan dengan nilai 90,26.

Grafik 2
Capaian Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi



7. Sasaran Strategis: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Pangawasan dan pengendalian terdiri dari tindak lanjut pengelolaan aset yaitu pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya dan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Itjen. Berikut target dan capaian pada KPKNL Bengkulu:

Tabel 8
Target dan Capaian Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
Uraian IKU	Target Awal	Target Addendum	Realisasi				
			Q1	Q2	Q3	Q4	2021
7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%			57,76%		90,36%	90,36%

Capaian KPKNL Bengkulu dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN yang efektif mengalami peningkatan di tahun 2021 apabila dibandingkan dengan capaian di tahun 2020. Pada tahun 2020, KPKNL Bengkulu memiliki capaian kinerja 80,65% dari target sebesar 80%. Berbagai upaya pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN dilakukan secara lebih intensif oleh KPKNL Bengkulu di tahun 2021 meskipun terdapat beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan upaya dimaksud karena adanya dampak pandemic *Covid-19*. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan koordinasi formal melalui surat yang dilakukan secara rutin di tiap semester.

8. Sasaran Strategis: SDM yang Kompeten

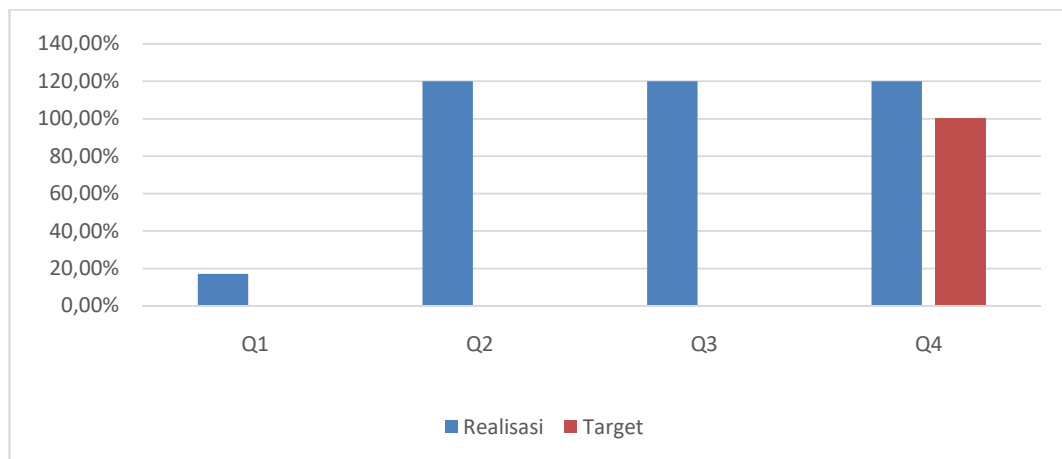
Pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan DJKN merupakan upaya pengembangan, pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap perilaku pegawai dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Pengukuran dilakukan dengan pemenuhan standar kompetensi teknis (kesesuaian antara penempatan/posisi pegawai saat ini dengan kompetensi/pelatihan pegawai yang dimiliki) serta memperhitungkan pemenuhan standar jamlat kegiatan program pengembangan kompetensi (Teknis/Manajerial) yang diikuti pegawai selama tahun 2021.

SDM KPKNL Bengkulu pada tahun 2021 sudah memenuhi standar pegawai yang berkompeten. Pegawai yang memenuhi standar jamlat program pengembangan pegawai telah mengikuti kegiatan berupa *soft competency* dan *hard competency* selama tahun 2021 sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-28/MK.1/2017 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Kementerian Keuangan seperti mengikuti pelatihan/diklat, *e-learning*, *workshop*, sosialisasi, *knowledge sharing*, maupun mengikuti

bimbingan teknis. Berikut target dan capaian pada pengembangan kompetensi pegawai pada KPKNL Bengkulu:

Grafik 3

Target dan Realisasi Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai



9. Sasaran Strategis: Organisasi yang *Fit For Purpose*

Organisasi yang fit-for-purpose adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi. Pengelolaan Kinerja dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi penyusunan kontrak kinerja, edukasi, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.

Terdapat 3 IKU dalam sasaran strategis ini diantaranya adalah nilai pemenuhan unit kerja terhadap criteria ZI menuju WBK/WBBM, nilai hasil revidu pengelolaan kinerja berbasis BSC dan indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator. Berikut rincian target dan realisasi capaian KPKNL Bengkulu:

Tabel 8

Target dan Realisasi Capaian Organisasi yang *Fit For Purpose*

Organisasi yang Fit For Purposes						
Uraian IKU	Target Awal	Target Addendum	Realisasi			
			Q1	Q2	Q3	Q4

9a-N Nilai pemenuhan unit kerja terhadap criteria ZI menuju WBK/WBBM	75	-				95,63	95,63
9b-N Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC	75	-				81,36	81,36
9c-N Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator	80	-	98,90	98,80	99,20	98,70	98,90

10. Sasaran Strategis: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.

Sasaran strategis pengelolaan anggaran yang berkualitas diwujudkan dalam IKU 12.a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran. Unsur yang diukur terdiri dari penyerapan anggaran, efisiensi, dan pencapaian keluaran.

- Penyerapan anggaran adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal, tidak termasuk belanja pegawai, yang mengacu pada Sistem Akuntansi Umum.
- Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sarannya telah dicapai (pencapaian output-nya lebih besar atau sama dengan 100%). Apabila pencapaian output tidak mencapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Hasil lebih atau sisa dana adalah selisih lebih pagu kontrak dengan realisasi kontrak.
- Pencapaian keluaran adalah pencapaian atas barang/jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran serta tujuan program dan kebijakan.

Data capaian kinerja diperhitungkan sesuai dengan ketentuan SE-8/MK.1/2020 tentang Tata Cara Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu. Proses penghitungan capaian dilakukan oleh pengelola keuangan pada unit masing-masing. Tujuan strategis IKU ini adalah: 1) memastikan anggaran dikelola

dengan efektif dan efisien sesuai perencanaan; 2) anggaran mendukung pencapaian output dan target kinerja.

Tabel 9
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Capaian
A)	Nilai IKPA		99,79%
	1.	Pengelolaan UP	8,00%
	2.	Data Kontrak	10,00%
	3.	Kesalahan SPM	5,00%
	4.	Retur SP2D	5,00%
	5.	Hal III DIPA	4,80%
	6.	Revisi DIPA	5,00%
	7.	Penyelesaian Tagihan	10,00%
	8.	Konfirmasi Capaian Output	17,00%
	9.	Rekon LPJ	5,00%
	10.	Perencanaan Kas	0,00%
	11.	Realisasi	15,00%
	12.	Pagu Minus	5,00%
	13.	Dispensasi SPM	5,00%
B)	Nilai SMART		92,81%
Capaian Triwulan IV			95,60%

Tabel 10
Rincian Target dan Capaian Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
Uraian IKU	Target Awal	Target Addendum	Realisasi				
			Q1	Q2	Q3	Q4	2021
10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	-	100%	99,56%	99,58%	95,60%	95,60%

3.2. Realisasi Anggaran

Untuk realisasi penyerapan anggaran dan pengukuran capaian output belanja dan penyerapan anggaran (non belanja pegawai) KPKNL Bengkulu periode tahun 2021 maka kita dapat memperoleh data-data sebagai berikut :

Tabel 11
Pengukuran Capaian Penyerapan Anggaran
KPKNL Bengkulu Tahun 2021

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	Belanja Pegawai	0	0	0	0%
2	Belanja Barang	1.729.151.000	1.653.242.964	75.908.036	95,61%
3	Belanja Modal	545.432.000	545.210.000	222.000	99,96%
4	Total	2.274.583.000	2.198.452.964	76.130.036	96,65%

Tabel 12
Pengukuran Capaian Output Belanja Dan Penyerapan Anggaran
KPKNL Bengkulu Tahun 2021
(Non Belanja Pegawai)

C. DATA PROYEKSI CAPAIAN RINCIAN OUTPUT

KODE	KRO / RO	Target	Satuan	Capaian	CRO	(CRO x Pagu) - Realisasi
4796.BMB.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	1		1	1,00	5.000
4796.BMB.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	2		2	1,00	10.000
4797.FAE.001	Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi	1		1	1,00	5.000
4798.AAH.001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	100		167	1,67	10.019.200
4798.AAH.002	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang	5		15	3,00	1.114.800
4798.AAH.003	Risalah Lelang	250		350	1,40	1.078.000
4798.FAE.001	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan	181		181	1,00	2.128.000
4798.FAE.003	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Asot dan Standar	309		309	1,00	1.109.000
4798.FAE.005	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	1		1	1,00	5.000
4798.FAE.006	Rekomendasi Hasil Penilaian	1		1	1,00	540.000
4700.EAG.001	Advokasi Hukum	2		6	3,00	2.652.000
4701.EAC.001	Operasionalisasi Kantor	12		12	1,00	52.285.201
4701.EAC.002	Kerumehntagaan	12		12	1,00	15.867.469
4701.EAD.001	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	132		132	1,00	454.966
4701.EAD.002	Peralatan Fasilitas Perkantoran	25		25	1,00	222.000
4701.EAD.003	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	2		2	1,00	-
4701.EAD.004	Kendaraan Bermotor	1		1	1,00	-
4701.EAE.001	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1677		1677	1,00	183.500
4702.BMB.003	Publikasi	5		15	3,00	3.009.900
4704.EAK.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	5		5	1,00	-
CRO					123,03%	90.689.036
Efisiensi						3,99%

Dari tabel-tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persentase penyerapan anggaran tahun 2021 mencapai 96,65% dan tingkat efisiensi anggaran sebesar 3,99% dengan capaian rincian output sebesar 123,03%. Hal tersebut menunjukkan bahwa KPKNL Bengkulu telah sukses dan berhasil mewujudkan pelaksanaan anggaran dengan tetap optimal dalam memberikan layanan dengan kualitas yang baik ditengah keterbatasan akibat dampak pandemi COVID-19.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Bengkulu ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi DJKN menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

KPKNL Bengkulu telah menerapkan manajemen kinerja yakni dengan membuat cascading target kinerja dengan menurunkan sasaran strategis Kemenkeu Four, memperjelas sasaran strategis dengan IKU, serta penandatanganan kontrak kinerja sampai tahap pelaksana. Dalam perjalanannya, KPKNL Bengkulu juga melakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk pelaporan berkala capaian kinerja, dan pelaksanaan rapat evaluasi. Sehingga diharapkan nilai kinerja organisasi KPKNL Bengkulu mampu untuk selalu meningkat disetiap tahunnya. Sebagai salah satu kantor pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), KPKNL Bengkulu telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan berhasil mencapai nilai kinerja organisasi sebesar 111,31%.

Langkah-langkah ataupun strategi yang akan dilakukan KPKNL Bengkulu dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara
 - a. Peningkatan layanan agar realisasi PNBK tahun 2022 semakin meningkat dan memperkokoh misi DJKN sebagai Revenue Center.
 - b. Memperkuat sinergi dengan Satuan Kerja agar program-program pengelolaan Kekayaan Negara berjalan dengan baik.
2. Bidang Pengurusan Piutang Negara
 - a. Upaya penagihan akan terus diintensifkan baik melalui telepon, surat maupun kunjungan langsung ke lapangan.
 - b. Penggalan potensi pengurusan Piutang Negara ke Pemerintah Daerah dan koordinasi dengan Penyerah Piutang.
3. Bidang Lelang

- a. Memanfaatkan Pekan Lelang dalam mengenalkan lelang kepada masyarakat dan *stakeholders*.
 - b. Penggalian potensi lelang kepada *stakeholders* yang masih jarang memanfaatkan layanan lelang.
4. Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
- a. Melakukan penajaman atas rencana kegiatan dan pembiayaan yang tercantum dalam DIPA TA 2022 tanpa menghilangkan efektivitas pencapaian *outcome*;
 - b. Meningkatkan evaluasi dan monitoring penyerapan anggaran dan pencapaian *output*.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak mengenai tugas dan fungsi KPKNL Bengkulu sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga KPKNL Bengkulu dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

LAMPIRAN

1. Kontrak Kinerja Kepala KPKNL Bengkulu Nomor : 7/KN.17/2021 tanggal 29 Januari 2021;
2. Rincian Target Capaian Kinerja Kepala KPKNL Bengkulu.



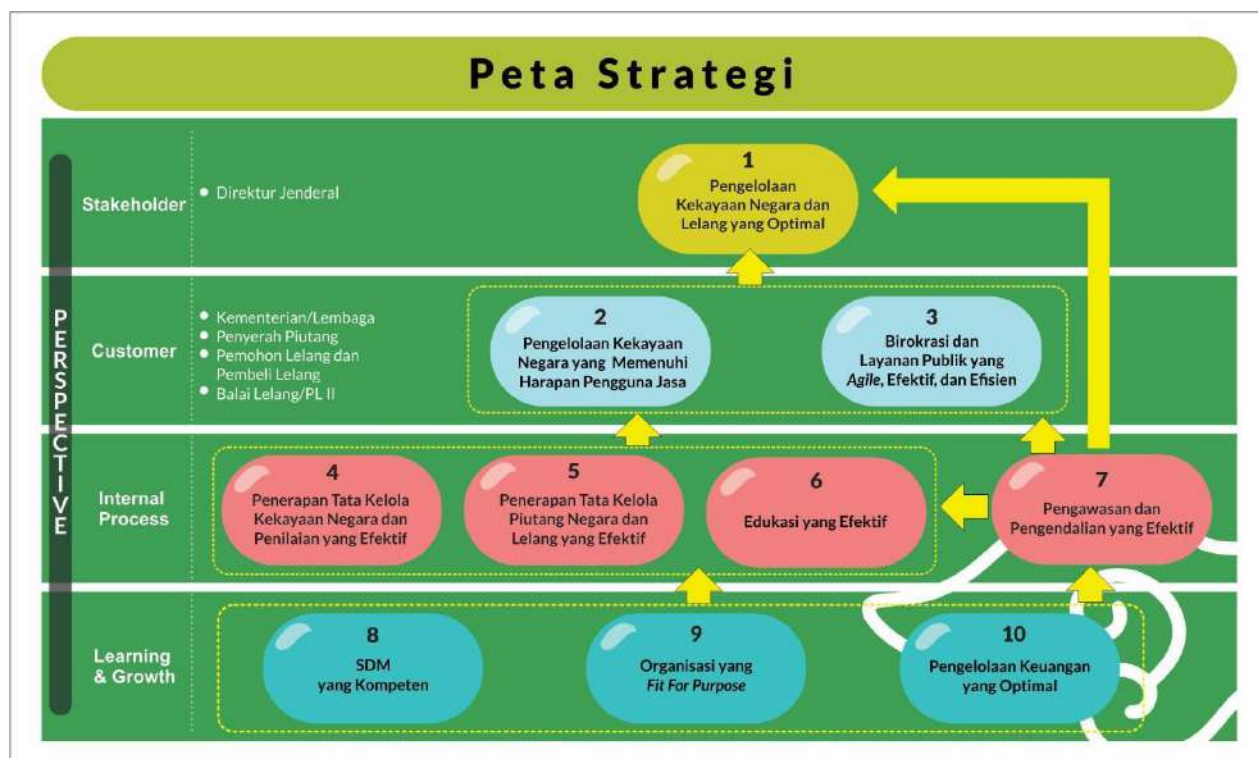
**KONTRAK KINERJA
NOMOR 7/KN.17/2021**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU
KANTOR WILAYAH DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi s.d. Januari 2021
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%
		1c-CP Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memeuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	87
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,38
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%
		4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%
		5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		5d-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
6	Edukasi yang Efektif	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
8.	SDM yang Kompeten	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9.	Organisasi yang Fit For Purpose	9a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	75
		9b-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
		9c-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU
KANTOR WILAYAH DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2021

No	SS, IKU	Target							
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal								
	1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%
	1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
	1c-CP	Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa								
	2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	87	87	87	87	87	87	87
	2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i>, Efektif, dan Efisien								
	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,38	4,38
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif								
	4a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	-	20%	20%	60%	60%	100%	100%
	4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	15%	45%	45%	75%	75%	100%	100%
	4c-CP	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif								
	5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
	5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	15%	20%	20%	25%	25%	35%	35%
	5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5 %	12,5 %	12,5 %	12,5 %	12,5 %	12,5%	12,5%
6	Edukasi yang Efektif								
	6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	89	89	-	89	89	89
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif								
	7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
8	SDM yang Kompeten								
	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
9	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>								

	9a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	-	-	-	-	-	75	75
	9b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	75	75
	9c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	80	80	80	80	80	80
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal								
	10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5%	95,5%

Bandar Lampung, 29 Januari 2021

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bengkulu,

Teddy Suhartadi Permadi

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Arik Hariyono	1	Nama	Teddy Suhartadi Permadi
2	NIP	196912021991031002	2	NIP	197303101999031002
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Muda, IV/c	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Tingkat I, IV/b
4	Jabatan	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu	4	Jabatan	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu
5	Unit Kerja	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	5	Unit Kerja	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	ANGKA KREDIT	TARGET			
			KUANTITAS / OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Meningkatkan Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	62%	100	12 bulan	-
2	Meningkatkan Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	-	100%	100	12 bulan	-
3	Menurunkan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	-	100%	100	12 bulan	-
4	Mewujudkan Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	-	87	100	12 bulan	-
5	Meningkatkan Realisasi Pokok Lelang	-	100%	100	12 bulan	-
6	Mewujudkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	4,38	100	12 bulan	-
7	Mensertifikasi Bidang tanah BMN	-	100%	100	12 bulan	-
8	Mengimplementasikan Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	100%	100	12 bulan	-
9	Meningkatkan Ketergunaan hasil Penilaian	-	78%	100	12 bulan	-
10	Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian BKPN	-	100%	100	12 bulan	-
11	Meningkatkan Produktivitas Lelang	-	35%	100	12 bulan	-
12	Melaksanakan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	-	92%	100	12 bulan	-
13	Meningkatkan Akurasi Data PNBP Fungsional DJKN	-	87,5%	100	12 bulan	-
14	Meningkatkan efektivitas edukasi dan komunikasi	-	89	100	12 bulan	-

15	Menindaklanjuti persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	85%	100	12 bulan	-
16	Mengembangkan kompetensi pegawai	-	100%	100	12 bulan	-
17	Mewujudkan Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	-	75	100	12 bulan	-
18	Mewujudkan Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	75	100	12 bulan	-
19	Melaksanakan FGD Pejabat Administrator	-	80	100	12 bulan	-
21	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan anggaran	-	95,5%	100	12 bulan	Rp2.6 24.14 8.000

Pejabat Penilai,

Bandar Lampung, 29 Januari 2021
PNS yang Dinilai,

Arik Hariyono

Teddy Suhartadi Permadi

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU
KANTOR WILAYAH DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
1	SS: Pengelolaan kekayaan negara yang optimal IKU: Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Optimalisasi BMN (KOIN)	1. Meningkatkan pengelolaan BMN yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi terhadap masyarakat 2. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi <i>underutilized/ idle</i> yang tidak sedang dimanfaatkan diajukan pemanfaatannya	12 Bulan	Seksi PKN	1. Rp 9.184.000,00 2. Rp55.656.000,00

Bandar Lampung, 29 Januari 2021
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Bengkulu,

Teddy Suhartadi Permadi
NIP 197303101999031002



KPKNL BENGKULU | DJKN

Foto : A.Syekhuddin
Lokasi Pelabuhan Ferry ASDP Enggano, Bengkulu